

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan**

##### **1. Pengertian Pemberdayaan.**

Pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empoworment*) berasal kata “*Power*” (kekuasaan atau keberdayaan).<sup>1</sup> Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan, sebagai proses, berperdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan untuk atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka perberdayaan menuju pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan.<sup>2</sup> Tujuan pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan.

---

<sup>1</sup> Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam*, (Bandung: Rosdakarya, 2001), hal 41-42.

<sup>2</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat.....* hal. 59-50

Menurut Totok dan Poerwoko istilah pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai :<sup>3</sup> Upaya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dll.

Pemberdayaan berarti suatu upaya atau kekuatan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat agar masyarakat dapat berdaya guna dalam memenuhi kebutuhan hidupnya ke arah yang lebih sejahtera. Konsep dasar pemberdayaan pada dasarnya yaitu upaya suatu kelompok masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian sehingga masyarakat dapat mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki dalam rangka tujuan hidup yang lebih sejahtera. Pemberdayaan yang diinginkan oleh masyarakat adalah pemberdayaan yang bisa membangun masyarakat ke arah lebih sesuai dengan tujuan pemberdayaan.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pemberian daya atau kekuatan (*power*) terhadap perilaku dan potensi individu atau masyarakat, serta pengorganisasian kelompok masyarakat oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri atas dasar partisipasi. Pemberdayaan tersebut bertujuan agar masyarakat dapat memiliki inisiatif untuk melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di sekitarnya agar dapat memperbaiki atau meningkatkan kualitas serta kondisi diri sendiri menjadi

---

<sup>3</sup> Totok dan Poerwoko, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 27

lebih baik. Pemberdayaan memiliki tujuan untuk membuat masyarakat menjadi mandiri, dan dapat memperbaiki segala aspek, dalam arti memiliki potensi agar mampu menyelesaikan masalah – masalah yang mereka hadapi dan sanggup memenuhi kebutuhannya dengan tidak menggantungkan hidup mereka pada bantuan pihak luar baik pemerintah maupun non pemerintah.

## 2. Masyarakat Nelayan

### a. Pengertian Masyarakat

Pengertian masyarakat yang dalam istilah bahasa Inggris disebut *Society* berasal dari kata latin, *socius* yang berarti ”kawan”. Masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab *syaraka* yang artinya ikut serta atau berperanserta. Jadi masyarakat adalah kumpulan manusia yang saling berinteraksi satu sama lainnya.<sup>4</sup> Masyarakat adalah kelompok manusia yang saling berinteraksi yang memiliki prasarana untuk kegiatan tersebut dan adanya saling keterikatan untuk mencapai tujuan bersama. Masyarakat adalah tempat kita bisa melihat dengan jelas individu sebagai keluarga, keluarga sebagai tempat prosesnya, dan masyarakat adalah tempat kita melihat hasil (*output*) dari proses tersebut.

### b. Pengertian Nelayan.

Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ikan ataupun budi daya. Mereka pada umumnya tinggal di

---

<sup>4</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hal 119-120

pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya.<sup>5</sup>

Biasanya masyarakat nelayan dibagi dalam kelompok sesuai dengan posisinya dalam 3 kelompok :<sup>6</sup>

- a. Nelayan juragan, yaitu nelayan pemilik alat lengkap, perahu yang dioperasikan oleh orang lain.
- b. Nelayan buruh, yaitu nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain.
- c. Nelayan perorangan, yaitu nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri, dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain.

Dari beberapa definisi masyarakat dan definisi nelayan yang telah disebutkan bahwa:

- a. Masyarakat nelayan adalah kelompok manusia yang mempunyai mata pencaharian menangkap ikan di laut.
- b. Masyarakat nelayan bukan hanya mereka yang mengatur kehidupannya hanya bekerja dan mencari di laut, melainkan mereka yang juga tinggal disekitar pantai walaupun mata pencaharian mereka adalah bercocok tanam dan berdagang.

Masyarakat nelayan adalah sekelompok manusia yang mempunyai mata pencaharian pokok mencari ikan dilaut dan hidup, tumbuh, dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut.

---

<sup>5</sup> Mulyadi, *Ekonomi Kelautan.....* hal. 07

<sup>6</sup> Ibid

Sebagai suatu sistem, masyarakat nelayan terdiri atas kategori-kategori sosial yang membentuk kesatuan sosial. Mereka juga memiliki sistem nilai dan simbol-simbol kebudayaan sebagai referensi perilaku mereka sehari-hari. Faktor kebudayaan ini menjadi pembeda masyarakat nelayan dengan kelompok sosial lainnya.

Sebagian besar masyarakat pesisir, baik langsung maupun tidak langsung, menggantungkan kelangsungan hidupnya dari mengelola potensi sumberdaya perikanan. Mereka menjadi komponen utama konstruksi masyarakat maritim Indonesia. Nelayan sebuah sebutan diberikan kepada kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir, dengan aktivitas mengeksploitasi, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya pesisir dan perairan yang bersifat milik semua orang (*common goods*) sebagai poros tumpu kehidupan sangat ditentukan oleh musim, rentan terhadap degradasi ekosistem, dan gejolak sosial ekonomi.<sup>7</sup>

### **3. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan**

Pemberdayaan diharapkan akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir. Dengan demikian akan lebih menjamin kesinambungan peningkatan pendapatan masyarakat dan pelestarian sumberdaya pesisir dan laut langsung dengan penduduk.

---

<sup>7</sup> Surya Irianto, *Nelayan Di Mata Kita Sebuah Perspektif Berpikir Sistem*, (Pekanbaru: CV. Sukabina, 2008), hal. 01

Pada dasarnya, pemberdayaan masyarakat nelayan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosia-budaya dan hal ini menjadi dasar membangun kawasan pesisir. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan dukungan kualitas sumberdaya manusia dan fungsi kelembagaan sosial ekonomi yang optimal dalam kehidupan warga. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan dan tujuan yang terukur, yang pencapaiannya dilakukan secara bertahap. Dengan memperhatikan kemampuan sumberdaya pembangunan yang dimiliki oleh masyarakat pesisir.<sup>8</sup>

Tujuan pemberdayaan dapat tercapai dengan baik jika terjadi interaksi antara masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya sosial, ekonomi dan lingkungan. Beberapa dasar filosofis yang harus dipertimbangkan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan adalah sebagai berikut :<sup>9</sup>

- a. Potensi sumberdaya alam yang ada di kawasan pesisir adalah karunia Allah SWT yang harus dijaga kelestariannya oleh semua pihak serta dikelola secara optimal dan berkelanjutan untuk kesejahteraan sosial-budaya dan kemakmuran ekonomi masyarakat nelayan.
- b. Pengelolaan potensi sumberdaya alam pesisir dan dan laut harus dilaksanakan oleh masyarakat pengguna berdasarkan sikap hati-hati, berorientasi pada kepentingan masa depan. Serta dilandasi oleh rasa tanggung jawab terhadap Allah SWT dan generasi penerus mereka.

---

<sup>8</sup> Kusnadi, *Strategi Hidup Masyarakat Nelayan*, (Yogyakarta : LkiS, 2007), hal. 39

<sup>9</sup> Kusnadi, *Filosofi Pemberdayaan Pesisir*, (Bandung : Humaniora, 2006), hal. 35

- c. Negara bertanggung jawab terhadap masa depan kehidupan warganya dan menjamin perwujudan hak-hak warga terhadap akses sumberdaya ekonomi dan lingkungan sebagai upaya menjaga kelangsungan hidup masyarakat dikawasan pesisir.
- d. Negara bertanggung jawab terhadap masa depan kehidupan warganya dan menjamin perwujudan hak-hak warga terhadap akses sumberdaya ekonomi dan lingkungan sebagai upaya menjaga kelangsungan hidup masyarakat di kawasan pesisir.
- e. Negara, masyarakat, dan pihak lain bertanggung jawab untuk melindungi kelestarian sumberdaya alam dari berbagai ancaman.

Di samping landasan filosofis di atas, asas-asas yang harus dijadikan acuan dalam mengaplikasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan adalah sebagai berikut:

- a. Asas kemanusiaan. Asas ini menempatkan pemberdayaan sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan dalam rangka memanusiakan manusia. Oleh karena itu, harus dihindari timbulnya percikan pemikiran dan aktivitas-aktivitas pemberdayaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.
- b. Asas keadilan sosial. Asas ini menempatkan kesejahteraan sosial dan kemakmuran ekonomi yang merata, proporsional, dan adil sebagai tujuan pembangunan dan menjadi sarana mewujudkan kebahagiaan dunia akhirat masyarakat di kawasan pesisir.

- c. Asas demokrasi partisipatif. Asas ini menempatkan bahwa kegiatan untuk mencapai tujuan pemberdayaan merupakan proses panjang yang harus menjadi tanggung jawab semua pihak. Demokratisasi dalam pemberdayaan merupakan upaya mewujudkan tanggung jawab kolektif dalam mengemban amanat pembangunan. Oleh karena itu, asas demokrasi partisipatif sangat menghargai dan menjunjung tinggi prakarsa lokal dan partisipasi masyarakat.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan akan mampu mencapai tujuan secara optimal jika masyarakat membuka diri terhadap partisipasi pihak-pihak lain, seperti swasta, LSM, atau perguruan tinggi yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan kawasan pesisir. Dalam kerja sama antara pihak ini, yang harus dipegang teguh oleh masyarakat adalah prinsip-prinsip saling menguntungkan dan tidak merugikan salah satu pihak, saling menghormati, serta dapat membawa arus perubahan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya ke arah yang lebih baik dari masa-masa sebelumnya. Agar skala pencapaian pemberdayaan cukup signifikan maka basis pemberdayaan pada masyarakat di kawasan pesisir adalah keluarga atau rumah tangga. Penguatan sosial, budaya, ekonomi, dan politik pada unit-unit terkecil dalam kehidupan masyarakat ini diharapkan akan memperkokoh integrasi sosial dan komitmen kolektif terhadap pembangunan kawasan pesisir secara berkelanjutan.

Beberapa indikator yang menandai bahwa suatu masyarakat nelayan memiliki keberdayaan adalah sebagai berikut:

a. Tercapainya kesejahteraan sosial ekonomi: individu, rumah tangga, dan masyarakat, yang ditandai dengan hal-hal berikut ini:

- 1) Kemandirian ekonomi berkembang, orientasi kewirausahaan meningkat, dan kepercayaan diri menguat.
- 2) Nilai tabungan dan investasi bertambah.
- 3) Kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi optimal dan berkelanjutan.
- 4) Kondisi kualitas SDM berkembang baik.

b. Kelembagaan-kelembagaan ekonomi yang ada dapat berfungsi optimal dan aktivitas ekonomi stabil.

- 1) Kelembagaan sosial atau pranata-pranata budaya berfungsi dengan baik sebagai instrumen aspirasi pembangunan lokal.
- 2) Potensi sumberdaya lingkungan sebagai basis kehidupan masyarakat pesisir terpelihara kelestariannya dan bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan.
- 3) Berkembangnya kemampuan akses masyarakat terhadap sumberdaya ekonomi: informasi, kapital, pasar, teknologi, dan jaringan kemitraan.
- 4) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan di kawasan pesisir dan tumbuhnya kesadaran kritis warga terhadap persoalan-persoalan pembangunan yang ada di kawasan pesisir.
- 5) Kawasan pesisir menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dan ekonomi nasional yang dinamis, serta memiliki daya tarik investasi.

#### 4. Kemiskinan Nelayan

Permasalahan utama yang dominan dihadapi oleh keluarga nelayan adalah kemiskinan. Kemiskinan yaitu sebagai salah satu faktor penyebab timbulnya berbagai masalah kesejahteraan muncul dalam berbagai bentuk ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, ketergantungan, dan keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial.<sup>10</sup> Begitu banyak pengertian tentang kemiskinan, tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa istilah kemiskinan selalu menunjuk pada sebuah kondisi yang serba kekurangan.

Masalah kemiskinan yang sering dihadapi nelayan disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola sumberdaya keuangan keluarga, manajemen alokasi waktu dan pekerjaan yang kurang efisien, keterampilan pengolahan hasil perikanan yang masih terbatas, dan rendahnya posisi tawar menawar (*bargaining power position*) bagi nelayan kecil yang dikarenakan lemahnya sistem kelembagaan dan keterampilan.

Dilihat dari lingkupnya, kemiskinan nelayan terdiri atas kemiskinan prasarana dan kemiskinan keluarga. Kemiskinan prasarana dapat diindikasikan pada ketersediaan prasarana fisik di desa-desa nelayan, yang pada umumnya masih sangat minim, seperti tidak tersedianya air bersih, jauh dari pasar, dan tidak adanya akses untuk mendapatkan bahan bakar yang sesuai dengan harga standar. Kemiskinan prasarana itu secara tidak langsung juga memiliki andil bagi munculnya kemiskinan keluarga. Karena tersedianya

---

<sup>10</sup> Khafifah Indar Parawansa, *Mungkur Paradigma Menembus Tradisi*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), hal. 10

air bersih akan memaksa keluarga untuk menengluarkan uang untuk membeli air bersih, yang berarti mengurangi pendapatan mereka.

Sedangkan keluarga nelayan masih mempunyai kemampuan yang rendah dalam mengelola keuangan keluarga yang dibuktikan dengan rendahnya perencanaan keuangan dan rendahnya pelaksanaan strategi penghematan pengeluaran terutama pada saat musim melaut dan sedikit melakukan strategi penambahan pendapatan keluarga.

Munculnya perilaku strategis dalam menghadapi krisis pada rumah tangga dilatarbelakangi oleh kemiskinan yang memaksa mereka untuk keluar dari keadaan tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan dan karakteristik sosial ekonomi rumah tangga merupakan hal-hal yang mendorong suatu rumah tangga melakukan *survival strategies*. Keluarga miskin di pesisir hampir selalu melibatkan seluruh anggota keluarganya dalam mencari nafkah sebagai upaya untuk bertahan hidup dan sebagai respon dari kondisi keluarga yang serba kekurangan. Anak-anak pada keluarga miskin memasuki dunia kerja lebih awal dari pada anak-anak pada keluarga berkecukupan.

Sesungguhnya, ada dua hal utama yang terkandung dalam kemiskinan, yaitu kerentanan dan ketidakberdayaan. Dengan kerentanan yang dialami, orang miskin akan mengalami kesulitan untuk menghadapi situasi darurat. Ini dapat dilihat pada nelayan perorangan misalnya, mengalami kesulitan untuk membeli bahan bakar untuk keperluan melaut. Hal ini disebabkan sebelumnya tidak ada hasil tangkapan yang biasa di jual, dan tidak ada dana

cadangan yang dapat digunakan untuk keperluan yang mendesak. Hal yang sama juga dialami oleh nelayan buruh, mereka merasa tidak berdaya di hadapan para juragan yang telah memperkerjakannya, meskipun bagi hasil yang diterimanya dirasakan tidak adil.

Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya. Pekerjaan sebagai nelayan secara mendasar banyak mengandung risiko dan ketidakpastian. Adanya risiko dan ketidakpastian ini disarankan untuk disiasati dengan mengembangkan pola adaptasi berupa perilaku ekonomi yang spesifik yang selanjutnya berpengaruh pada pranata ekonomi.

Masyarakat nelayan diharapkan dapat menanggulangi kesulitan dan krisis ekonomi keluarga yang dihadapinya, terutama pada saat peceklik (musim angin barat / tidak melaut). Selain itu, untuk mengatasi kesulitan modal, masyarakat nelayan disarankan untuk mengembangkan suatu mekanisme tersendiri, yaitu sistem modal bersama. Sistem ini memungkinkan terjadinya kerja sama di antara nelayan dalam pengadaan modal, juga menunjukkan terjadinya “pemerataan risiko”.<sup>11</sup>

Pemerataan risiko juga akan terjadi melalui pemberian upah secara bagi hasil, ini memungkinkan kelompok kerja nelayan dapat menikmati keuntungan maupun kerugian secara bersama-sama. Pada masyarakat nelayan yang mengembangkan pola kepemilikan individu, sistem bagi hasil, pada kenyataannya dapat mendorong terjadinya akumulasi modal hanya pada

---

<sup>11</sup> Mulyadi, *Ekonomi Kelautan*,.....hal. 13-14

kelompok kecil tertentu. Sebaliknya masyarakat nelayan yang mengembangkan kepemilikan kolektif, memungkinkan lebih besarnya perolehan pendapatan. Meskipun demikian, pola pembagian risiko ini akan tetap tumbuh dan berkembang dalam organisasi nelayan, terutama ketika pendapatan ekonomi nelayan tidak teratur. Kondisi ekonomi dimana jumlah kebutuhan yang semakin meningkat dengan bertambahnya anggota keluarga yang memerlukan berbagai kebutuhan baik bersifat primer maupun sekunder.

Secara sosial bahwa bekerja tidak sekedar bertahan hidup tetapi juga memerlukan kerukunan tetangga serta tolong menolong dalam masyarakat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perempuan nelayan untuk bekerja pada sektor ekonomi publik yaitu : faktor-faktor penyebab terjadi permasalahan gender adalah tingkat pendapatan nelayan yang masih rendah menyebabkan tekanan ekonomi keluarga. Tingkat pendapatan yang rendah menjadikan para nelayan hanya terfokus pada upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Hal ini terjadi karena kurang berusaha dan kurang mendapat akses dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga, tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, sosial budaya yang tidak berpihak kepada akses perempuan. Karena itulah potensi yang demikian itu akan bernilai apabila manusia berusaha untuk memanfaatkannya, dengan demikian untuk mengembangkan dan penggalian sumberdaya laut yang tersedia itu diperlukan adanya sumberdaya manusia yang terampil.

## **B. KENDALA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN**

Kebijakan pembangunan disektor kelautan dan perikanan selama ini dapat dikatakan belum berhasil menyelesaikan permasalahan kemiskinan nelayan secara mendasar. Modernisasi perikanan belum mampu menghapus kemiskinan di masyarakat nelayan. Selai itu faktor keamanan di laut masih kurang terlindungi. Adapun kendala para nelayan yang sering terjadi dapat dibedakan menjadi beberapa faktor. Diantaranya adalah :

### **a. Rendahnya Kualitas Sumber Daya**

Potensi sumber daya alam di wilayah Pantai Selatan Jawa Timur meliputi potensi sumber daya pesisir, laut, dan perikanan. Kawasan pesisir meliputi hutan alam dan pemandangan yang indah. Gelombang laut yang besar dan gulung-gulung juga merupakan daya tarik alam yang menajubkan.<sup>12</sup> Sumber daya pesisir memiliki fungsi penting bagi ekosistem global di Indonesia memiliki daerah pesisir yang sangat luas.

Namun karena rendahnya sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat maka produk laut yang dihasilkan hanya sedikit. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya sumber daya nelayan. Sementara itu, akselerasi peningkatan ekonomi mereka lemah, akibat dari kurangnya akses informasi, teknologi, dan modal yang diberikan. Sangat disayangkan karena bisa kita lihat Indonesia kaya dengan sumberdaya alam, jika tidak dimaksimalkan maka kemiskinan akan terus meluas.

---

<sup>12</sup> Ono Surono, *Koperasi Nelayan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan*,....., hal. 107

**b. Rendahnya Pendidikan Nelayan.**

Pendidikan yang dimiliki nelayan pada umumnya rendah. Hal tersebut dipengaruhi oleh rendahnya pendidikan orang tua dan persepsi orang tua terhadap pendidikan tinggi. Nelayan menganggap pendidikan bukanlah merupakan kebutuhan yang paling utama. Sebagai seorang nelayan yang dibutuhkan hanya keterampilan dan kerja keras, bagaimana memperoleh tangkapan yang melimpah serta menjualnya dengan harga tinggi. Disisi lain pendidikan sangat diperlukan nelayan sebagai contoh disaat melaut seseorang nelayan harus mengetahui arah angin, proses jual beli ikan, dan mengawetkan ikan.

Biaya yang harus dikeluarkan untuk pendidikan anak-anak nelayan adalah biaya mondok di pesantren karena biayanya lebih murah. Dengan pengeluaran biaya pendidikan yang murah menjadi harapan para nelayan, khususnya nelayan-nelayan tradisional karena bisa menyesuaikan dengan fruktiasi pendapatan melaut, yang kadang-kadang juga memperoleh hasil tangkapan sedikit.<sup>13</sup>

Alasan orang tua nelayan tidak menyekolahkan anaknya ke jenjang perguruan tinggi karena orang tua menganggap bahwa anak harus meneruskan pekerjaan orang tua, selain itu disebabkan karena susah nya mencari pekerjaan. Pola pikir masih sempit membuat kehidupan nelayan semakin terpuruk. Karena nelayan beranggapan pekerjaan menangkap ikan

---

<sup>13</sup> Kusnadi, *Jaminan Sosial Nelaya*, (Yogyakarta LKiS Pelangi Aksara, 2007)), hal. 98

merupakan pekerjaan turun menurun yang tidak memerlukan status pendidikan tinggi.<sup>14</sup>

**c. Cuaca Tidak Menentu**

Kondisi tergantung pada musim juga sangat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Terkadang beberapa pecan nelayan tidak melaut dikarenakan musim yang tidak menentu. Kondisi lain yang turut berkontribusi memperburuk tingkat kesejahteraan nelayan adalah mengenai kebiasaan atau pola hidup. Kendala yang sering terjadi adalah pola hidup konsumtif, dimana ketika memperoleh penghasilan banyak digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan sekunder, tidak untuk persiapan ketika memasuki masa paceklik.

Pada musim paceklik (masa tidak ada tangkapan), yang biasanya terjadi pada musim Barat (Desember-Januari), desa-desa nelayan menghadapi masa yang sepi, seangkan pada bulan-bulan lainnya dinamika sosial ekonomi masyarakat nelayan bisa dirasakan.<sup>15</sup> Musim paceklik yang selalu datang tiap tahunnya dan lamanya pun tidak dapat dipastikan akan semakin membuat masyarakat nelayan harus berada dalam keterpurukan ekonomi setiap tahunnya.

Dengan memperhatikan fruktiasi produktivitas karena kondisi musim dan iklim, sumber daya perikanan merupakan potensi yang sangat menentukan eksistensi sebuah desa nelayan. Desa nelayan akan tetap ada jika sumber daya perikanan laut yang terkandung di perairan setempat masih

---

<sup>14</sup> Ono Surono, *Koperasi Nelayan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan*,....., hal. 30

<sup>15</sup> Ibid, hal. 63

memberikan kehidupan kepada nelayan sehingga musim paceklik merupakan hal biasa.

Pada masa sekarang dampak yang terjadi terhadap masyarakat nelayan adalah berkurangnya pendapatan mereka atau tidak memperoleh sama sekali sehingga kondisi demikian menghadapkan rumah tangga mereka pada kesulitan hidup. Untuk itu, kemampuan sumber daya perikanan memberi kehidupan masyarakat nelayan tidak hanya berperan strategis dalam menentukan keberadaan sebuah desa nelayan, tetapi juga menjaga kelangsungan hidup masyarakat.<sup>16</sup>

#### **d. Rendahnya Pemanfaatan Teknologi**

Dapat dipahami, jika ketergantungan nelayan terhadap teknologi penangkapan itu sangat tinggi. Hal tersebut disebabkan selain kondisi sumber daya perikanan yang bersifat *mobile*, yaitu mudah berpindah dari satu tempat ke tempat lain, juga untuk menangkapnya nelayan perlu sarana bantu untuk dapat bertahan lama hidup di atas air.

Pada umumnya para nelayan masih mengalami keterbatasan teknologi penangkapan. Dengan alat tangkap yang sederhana, wilayah melautpun terbatas, hanya disekitar perairan pantai. Disamping itu nelayan tidak bisa menghadapi kondisi alam, karena alam tidak akan bisa dilawan. Hal yang bisa dilakukan dalam menghadapi adalah perlunya masyarakat nelayan memiliki penguasaan dalam aspek informasi, cuaca dan lokasi. Nelayan diberbagai

---

<sup>16</sup> Ibid, hal 64

wilayah membutuhkan dukungan yang konkret dari berbagai pihak mengenai prediksi cuaca dan lokasi mana berkemungkinan terjadi badai sehingga lokasi dilaut dapat dihindari, dan alternative wilayah tangkapan yang relative aman didapatkan.

Selain rendahnya teknologi penangkapan yang dimiliki oleh nelayan pada umumnya, hal lain yang dihadapi nelayan adalah tidak semua nelayan memiliki alat tangkap. Bagi nelayan yang demikian, tidak ada alternative lain kecuali harus bekerja pada orang lain yang membutuhkan tenaganya yaitu menjadi buruh nelayan.

Kemampuan untuk meningkatkan peralatan itu sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi seorang nelayan. Sesuai dengan kondisi ekonominya, peralatan yang mampu dibeli adalah peralatan yang sederhana, atau bahkan mungkin tidak mampu membeli peralatan tangkap sama sekali sehingga menempatkan kedudukannya sebagai nelayan buruh. Akibatnya kemampuan untuk melakukan atau meningkatkan hasil tangkapan menjadi sangat terbatas. Kondisi Ini mengakibatkan nelayan mengalami kesulitan untuk dapat melepaskan diri dari kemiskinan karena kemiskinan dialami oleh para nelayantersebut menjadi semacam “lingkaran setan”.<sup>17</sup>

### **C. HASIL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN**

Kendala kemiskinan menjadi hambatan utama dalam pemberdayaan masyarakat nelayan, dalam upaya mengimbangi kendala tersebut diperlukan adanya

---

<sup>17</sup> Mulyadi, *Ekonomi Kelautan*,....., hal, 49-51

perubahan paradigma pembangunan.<sup>18</sup> Untuk mengentaskan kemiskinan para nelayan miskin, pemerintah telah melakukan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Salah satunya adalah Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP).<sup>19</sup> Program PEMP ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pendekatan ekonomi dan kelembagaan sosial. Dalam *position paper* pemberdayaan masyarakat pesisir Departemen Kelautan dan perikanan disebutkan, bahwa berdasarkan karakteristik masyarakat pesisir (nelayan) dan cakupan pemberdayaan, maka pemberdayaan nelayan patut dilakukan secara komprehensif. Pembangunan yang komprehensif yakni pembangunan dengan ciri-ciri :<sup>20</sup>

- a. Berbasis local (melibatkan sumberdaya local sehingga *return to local resource* dapat dinikmati oleh masyarakat local. Sumberdaya local yang patut digunakan adalah sumberdaya manusia dan sumberdaya alam.
- b. Berorientasi pada peningkatan kesejahteraan (menitikberatkan kesejahteraan masyarakat dan bukannya peningkatan produksi)
- c. Berbasis kemitraan (kemitraan antara orang local atau orang miskin dengan orang yang lebih mampu, untuk membuka akses terhadap teknologi, pasar, pengetahuan, modal, amanjemen yang lebih baik atau professional , serta pergaulan bisnis yang lebih kuat).

Program PEMP yang diebntuk oleh pemerintah pusat memberikan dampak yang positif bagi para nelayan miskin didaerah pesisir. Beberapa aspek yang

---

<sup>18</sup> Khafifah Indar Parawansa, *Mungukur Paradigma Menembus Tradisi*,....., hal. 86

<sup>19</sup> Kusnadi, *Polemik Kemiskinan Nelayan*,....., hal. 33

<sup>20</sup> Rajab Ali Akbar, Strategi Pemberdayaan Nelayan Miskin, dalam <http://www.kompasiana.com/2016/01/12>, diakses tanggal 10 Juni 2017, pukul 19:30

berubah setelah adanya pemberdayaan program ini antara lain seperti pendapatan para nelayan. Tidak hanya melalui program PEMP, pemberdayaan masyarakat pesisir terutama para nelayan miskin juga bisa dilakukan dengan bentuk-bentuk program lainnya yang berasal dari pemerintah ataupun dari komunitas nelayan itu sendiri.

Beberapa aspek yang bisa diperhatikan dan dijadikan prioritas dalam perencanaan dan formulasi strategi pemberdayaan nelayan miskin antara lain seperti:

a) Pengembangan akses permodalan.

Strategi ini sangat penting karena pada dasarnya, permasalahan utama yang selalu dirasakan menjadi faktor utama penghambat dalam menaikkan taraf ekonomi para nelayan miskin adalah sulitnya memperoleh modal untuk pengembangan teknologi dan skala usahanya. Pemerintah bisa mengalokasikan dana yang lebih besar untuk memberikan modal kepada para nelayan, dikarenakan masih tingginya ketidak inginan bank di Indonesia untuk menyediakan modal bagi usaha perikanan para nelayan.

b) Pengembangan teknologi dan skala usaha perikanan.

Teknologi yang digunakan nelayan pada umumnya masihlah teknologi yang sederhana. Penggunaan teknologi yang masih sederhana ini kemudian berdampak pada rendahnya pendapatan mereka. Diperlukan upaya yang lebih dalam meningkatkan pendapatan lewat perbaikan teknologi dan penggunaan teknologi yang lebih modern. Bila mana telah diberlakukan penggunaan

teknologi yang lebih modern dan efektif, pemberdayaan tersebut harus terus dilanjutkan dan disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan nelayan, baik dari segi kapasitas kemampuan dan keterampilan sumberdaya mereka.

c) Pengembangan akses pemasaran.

Pasar adalah faktor penting dalam menjalankan usaha. Tidak adanya pasar dan strategi pemasaran bisa menjadi kendala utama sebuah usaha apabila tidak berkembang. Oleh karenanya, pemerintah harus membuka dan memberikan akses yang lebih luas lagi dalam pemasaran hasil tangkapan para nelayan miskin. Perbaikan sistem dan pengembangan akses pemasaran merupakan salah satu hal yang penting dipertimbangkan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir oleh pemerintah daerah, sehingga para nelayan miskin bisa bersaing dengan para nelayan kaya dan pemilik modal lainnya.

d) Penguatan kelembagaan para nelayan dan masyarakat pesisir.

Penguatan kelembagaan di kalangan masyarakat nelayan dapat membangun aksi solidaritas sosial dan kolektifitas masyarakat dalam bentuk kelompok-kelompok yang meninjau kebutuhan mereka. Melalui kelembagaan masyarakat ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tukar masyarakat pesisir secara sosial dan ekonomi, serta menadi sebuah pondasi yang kokoh dalam upaya menanggulangi kemiskinan secara mandiri. Peran pemerintah pusat dan daerah bisa diposisikan dalam kegiatan-kegiatan manajerial dalam memberikan wawasan, pengetahuan dan keterampilan, serta pendidikan mengenai manajemen usaha perikanan. Harapannya lewat kelembagaan yang

kemudian terbentuk adalah mendorong modal sosial para nelayan sehingga lebih memiliki kekuatan secara sosial dan ekonomi yang mandiri. Pembinaan dan pelatihan diperlukan sebagai peran penting pemerintah untuk menciptakan masyarakat nelayan yang mandiri pada akhirnya.

e) Pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya perikanan diakomodasi dalam manajemen perikanan partisipatori. Manajemen ini dapat berupa manajemen berbasis. Manajemen berbasis masyarakat berfokus pada masyarakat, sedangkan ko-manajemen merupakan kemitraan antara pemerintah, masyarakat serta pengguna sumberdaya lainnya. Pengelolaan berbasis masyarakat akan lebih optimal direalisasikan dengan pendekatan konsep *co-management*. *Co-management* adalah konsep manajemen pengelolaan bersama, artinya pelbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) setuju saling berbagi peran dalam pengelolaan, hak dan tanggung jawab, atas suatu kawasan atau sumberdaya alam yang dimaksud. Dengan tujuan utama agar pengelolaan lebih tepat, efisien, adil dan merata.

f) Pembangunan sarana dan prasarana penunjang usaha perikanan.

Sarana dan prasarana merupakan factor penting dalam menunjang usaha perikanan para nelayan miskin. Saran dan prasarana merupakan sebuah urat nadi dari berbagai macam kegiatan dan usaha. Minimnya saran dan prasarana yang dimiliki oleh para nelayan miskin di daerah pesisir yang masih tertinggal sangat mempengaruhi perkembangan usaha mereka. Pemerintah

pusat harus bekerja sama dengan pemerintah daerah dan komunitas nelayan untuk melihat keadaan dan kemudian memberikan bantuan pembangunan saran dan prasarana penunjang bagi nelayan.

### **Kesejahteraan Keluarga**

Pengertian keluarga sejahtera dalam UU No. 10 tahun 1992 adalah keluarga yang dibentuk dalam perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi selaras seimbang antar anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Istilah kesejahteraan sering diartikan sebagai kondisi sejahtera (konsepsi pertama), yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Pengertian seperti ini menempatkan kesejahteraan sebagai tujuan dari suatu kegiatan pembangunan. Misalnya, tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat. Pemaknaan kesejahteraan sebagai arena menempatkan kesejahteraan sebagai arena atau wahana atau alat untuk mencapai tujuan pembangunan.<sup>21</sup>

Hal tersebut dapat dikembangkan lebih luas lagi dengan berbagai upaya atau usaha dan kegiatan, seperti meningkatkan pendidikan dan keterampilan yang diperlukan, ikut mengupayakan dalam kehidupan bangsa serta meningkatkan pendapatan keluarga, meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan keluarga, meningkatkan derajat kesehatan kelestarian hidup serta membiasakan hidup

---

<sup>21</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal. 03

berencana dalam semua aspek kehidupan dan perencanaan ekonomi keluarga dengan membiasakan menabung. Kesejahteraan keluarga pada intinya mencakup konsepsi antara lain, yaitu : “Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial”.

Pengertian seperti ini, menempatkan kesejahteraan sebagai tujuan dari suatu kegiatan pembangunan. Misalnya, tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. Dengan demikian, prioritas utama pembangunan kesejahteraan adalah kelompok-kelompok yang kurang beruntung, khususnya yang terkait dengan masalah kemiskinan.<sup>22</sup>

Di dalam rangka membangun keluarga sejahtera yang bertujuan untuk mengembangkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram dan harapan masa depan yang baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin, maka suami dan isteri harus melaksanakan peranan dan atau fungsi sesuai dengan kedudukannya. Dengan demikian, keluarga akan merupakan suatu unit terkecil dalam masyarakat yang bukan hanya berfungsi sosial budaya, tetapi juga berfungsi ekonomi. Apabila tekanan fungsi keluarga secara tradisional adalah fungsi reproduktif - yang dari generasi ke generasi mengulangi fungsi yang sama – kemudian telah berkembang ke fungsi sosial budaya. Namun, belakangan ini keluarga diandalkan untuk suatu tugas yang lebih luhur yaitu, sebagai wahana mencapai tujuan pembangunan. Hal ini menyebabkan keluarga perlu

---

<sup>22</sup> Benny Soembodo, *Kesejahteraan Keluarga (Pandangan Masyarakat Miskin Perkotaan Mengenai Kesejahteraan Sosial)*, (Unair: Dosen Departemen Sosiologi) hal 4-5

mempersiapkan diri dalam keterlibatannya sebagai agen pembangunan di sektor ekonomi produktif.

Kesejahteraan keluarga adalah terciptanya suatu keadaan yang harmonis dan terpenuhinya kebutuhan jasmani serta sosial bagi anggota keluarga, tanpa mengalami hambatan yang serius di dalam keluarga, dan dalam menghadapi masalah-masalah keluarga akan mudah untuk di atasi secara bersama oleh anggota keluarga, sehingga standar kehidupan keluarga dapat terwujud.<sup>23</sup> Konsep tersebut mengandung arti bahwa, kesejahteraan keluarga adalah suatu kondisi yang harus diciptakan oleh keluarga dalam membentuk keluarga yang sejahtera. Adapun keluarga sejahtera merupakan model yang dihasilkan dari usaha kesejahteraan keluarga.

#### **D. PENELITIAN TERDAHULU**

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hamdan (2005), dalam tesisnya yang berjudul “Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP 2001) Di Kabupaten Jepara Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat Pesisir”. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan PEMP 2001 di 4 Desa dan untuk mengetahui pengaruh program PEMP 2001 terhadap peningkatan pendapatan masyarakat pesisir di daerah tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitiannya eksploratif yang bersifat studi kasus.

---

<sup>23</sup> Sutedjo, *Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga*, (Jakarta: Azka Press, 2005), hal.1-2

Hasil dari penelitian ini menunjukkan Program PEMP 2001 di Kabupaten Jepara dapat dikatakan berhasil karena terlihat dari segi kelembagaannya dengan adanya pembentukan kelompok, mekanisme perguliran dan penyerapan dana bantuan yang dapat terlaksana dengan baik.<sup>24</sup> Persamaan dengan skripsi yang penulis angkat adalah sama-sama membahas mengenai pemberdayaan masyarakat. Perbedaan antara penelitian dengan keduanya terletak pada subyeknya, jika peneliti memilih subyeknya pada masyarakat pesisir maka penulis lebih fokus ke masyarakat nelayan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Marfiani (2004), dalam skripsinya yang berjudul “Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (Studi Kasus di Kecamatan Parigi Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak langsung dari pelaksanaan program PEMP, efektivitas pemberian dana bantuan program PEMP, serta mengkaji faktor apa saja yang mempengaruhi pendapatan usaha peserta program PEMP. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang digunakan untuk menganalisis proses pelaksanaan program PEMP.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi program PEMP masih kecil, sehingga tidak ada perubahan struktural setelah pemberian dana bantuan program PEMP, maka dapat disimpulkan bahwa pemberian dana bantuan PEMP di Kecamatan Parigi belum efektif.<sup>25</sup> Persamaan dengan skripsi

---

<sup>24</sup> Hamdan, THESIS, *Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP 2001) Di Kabupaten Jepara Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat Pesisir*, (Semarang : Universitas Diponegoro, 2005), hal. 66

<sup>25</sup> Teni Marfiani, SKRIPSI, *Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*

yang penulis angkat adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaan antara penelitian dengan keduanya terletak pada obyeknya, jika penulis meneliti program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di seluruh Kecamatan Parigi Kabupaten Ciamis, maka penulis hanya meneliti pemberdayaan masyarakat nelayan oleh kelompok nelayan Tuna Jaya di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2013), dalam skripsinya yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Oleh Kelompok Nelayan Di Desa Palang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan masyarakat nelayan yang dilakukan oleh kelompok nelayan di Desa Palang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban serta untuk mengetahui hasil yang diperoleh masyarakat nelayan setelah adanya pemberdayaan masyarakat nelayan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dimana metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan dalam memberdayakan masyarakat nelayan, kelompok nelayan dengan segala kemampuannya memberikan pengarahan dan pendampingan kepada masyarakat nelayan dalam meningkatkan penghasilan penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan teknologi berupa GPS (Global Positioning System).<sup>26</sup> Persamaan

---

*Pesisir (Studi Kasus di Kecamatan Parigi Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat)*, (Bogor : Institut Pertanian Bogor, 2004), hal. 130

<sup>26</sup> Achmad Eko Wahyudi, SKRIPSI, *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Oleh Kelompok Nelayan Di Desa Palang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban* (Surabaya :

dengan skripsi yang penulis angkat adalah sama-sama membahas mengenai pemberdayaan masyarakat nelayan. Perbedaan antara penelitian dengan keduanya terletak pada obyeknya, jika peneliti memilih obyeknya di Desa Palang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban maka penulis memilih obyeknya di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek

4. Penelitian yang dilakukan oleh Sipahelut (2010), dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemberdayaan masyarakat nelayan dan implikasi dari program PEMP pada masyarakat nelayan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif-deskriptif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa katakata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dapat diamati. Pendekatan ini dilakukan dan diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan program PEMP memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat nelayan sehingga dapat merubah status nelayan buruh menjadi nelayan pemilik.<sup>27</sup> Persamaan dengan skripsi yang penulis angkat adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif untuk metodenya. Perbedaan antara penelitian dengan keduanya terletak pada subyeknya, jika peneliti memilih subyek seluruh masyarakat nelayan di Kecamatan Tobelo, maka penulis

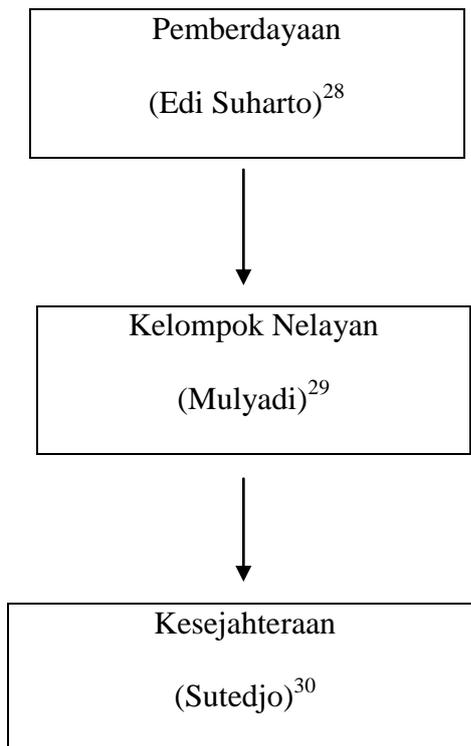
---

IAIN Sunan Ampel, 2013), hal.97

<sup>27</sup> Michel Sipahelut, THESIS, *Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara*, (Bogor : Institut Pertanian Bogor, 2010), hal. 87

memilih subyeknya satu kelompok nelayan di Kecamatan Watulimo, yaitu kelompok nelayan Tuna Jaya di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek.

#### A. KERANGKA BERFIKIR PENELITIAN



Dengan adanya Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan, diharapkan dapat membantu memperbaiki perekonomian nelayan agar lebih meningkat, selain itu akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir. Dengan demikian akan lebih menjamin kesinambungan peningkatan pendapatan masyarakat dan pelestarian sumberdaya pesisir dan laut langsung dengan penduduk.

---

<sup>28</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*,.....,hal 57

<sup>29</sup> Mulyadi, *Ekonomi Kelautan*,.....,hal. 07

<sup>30</sup> Sutedjo, *Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga*,.....,hal.1-2